Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 18442-18452
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Praktik Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Sahmin Noholo, Fitriyanti Kadir, Risnawati Gobel, Mayantri Yusuf, Rislan R. Ali
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
sahminnoholo@ung.ac.id fitriyantikadir2@gmail.com risnawatigobel12@gmail.com myaayusuf@gmail.com
rislanali4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh praktik corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan, dokumen regulasi Otoritas Jasa Keuangan, dan publikasi ilmiah yang relevan dalam lima tahun terakhir. Data dianalisis secara deskriptif melalui analisis konten untuk mengidentifikasi keterkaitan antara transparansi laporan keuangan, independensi dewan komisaris, akuntabilitas manajemen, serta perlindungan pemegang saham minoritas dengan kinerja keuangan yang diukur menggunakan Return on Assets dan Return on Equity. Hasil penelitian terhadap sepuluh perusahaan terpilih menunjukkan bahwa perusahaan dengan penerapan corporate governance yang baik cenderung memiliki tingkat profitabilitas lebih tinggi daripada perusahaan dengan praktik tata kelola yang rendah. Transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas manajemen menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan peningkatan Return on Assets, sedangkan independensi dewan komisaris dan perlindungan pemegang saham minoritas lebih berperan dalam peningkatan Return on Equity dan kepercayaan investor. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko konflik kepentingan, dan menjaga stabilitas keuangan. Penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen perusahaan dan regulator agar memperkuat pengawasan, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan pemegang saham untuk mendukung daya saing dan keberlanjutan perusahaan di pasar modal Indonesia.

Kata kunci : Corporate Governance, Kinerja Keuangan, ROA, ROE, Bursa Efek Indonesia

1. Latar Belakang

Corporate Governance (CG) atau tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, manajemen, dan pihak eksternal lainnya, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Tata kelola perusahaan yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dalam pengambilan keputusan. Menurut Sutrisno et al. (2021), praktik corporate governance yang efektif tidak hanya meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor, tetapi juga mendorong stabilitas kinerja keuangan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Di Indonesia, perhatian terhadap corporate governance meningkat seiring dengan perkembangan pasar modal dan investasi publik. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat peningkatan jumlah perusahaan publik yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sejak 2019 hingga 2024. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik CG secara konsisten cenderung memiliki Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) yang lebih tinggi dibanding perusahaan dengan praktik CG yang lemah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara tata kelola perusahaan dengan kinerja keuangan.

Meskipun regulasi dan panduan CG di Indonesia telah diperkuat melalui Peraturan OJK dan Code of Corporate Governance, masih terdapat fenomena perusahaan publik yang mengalami masalah kinerja keuangan akibat praktik CG yang tidak optimal. Misalnya, beberapa kasus yang dilaporkan antara tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, lemahnya pengawasan dewan komisaris, serta kurangnya transparansi laporan keuangan. Fenomena ini menimbulkan keraguan investor dan memicu volatilitas nilai saham perusahaan. Menurut Prasetyo dan Hadi (2022), lemahnya praktik CG menjadi

salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan pasar dan persaingan global.

Dinamika ekonomi global dan domestik juga menuntut perusahaan untuk meningkatkan tata kelola. Pandemi COVID-19, misalnya, memberikan tekanan besar pada kinerja keuangan perusahaan publik. Menurut Nugroho et al. (2021), perusahaan dengan praktik CG yang baik mampu lebih cepat menyesuaikan strategi operasional dan keuangan, menjaga likuiditas, serta mempertahankan kepercayaan investor dibanding perusahaan dengan praktik CG yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa corporate governance tidak hanya relevan untuk kepatuhan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko dan pengambilan keputusan strategis.

Permasalahan utama yang muncul dari fenomena tersebut adalah ketidakmerataan penerapan praktik corporate governance di perusahaan publik. Beberapa perusahaan masih belum menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi secara optimal, sehingga berpotensi menurunkan kinerja keuangan. Data BEI (2024) mencatat bahwa sekitar 30% perusahaan publik di Indonesia belum memenuhi standar minimal laporan keberlanjutan dan praktik pengawasan internal yang memadai. Masalah ini menjadi penting karena kinerja keuangan yang buruk tidak hanya merugikan pemegang saham, tetapi juga menurunkan reputasi perusahaan di pasar modal, mengurangi minat investor, dan meningkatkan risiko likuiditas.

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah peningkatan kualitas praktik corporate governance melalui beberapa strategi. Pertama, perusahaan perlu memperkuat peran dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, termasuk pengawasan terhadap pengambilan keputusan strategis dan risiko keuangan. Kedua, perusahaan harus meningkatkan transparansi melalui pelaporan keuangan yang akurat dan audit yang independen. Ketiga, perlu adanya mekanisme perlindungan bagi pemegang saham minoritas dan kepatuhan terhadap regulasi OJK serta praktik terbaik CG internasional. Menurut Wijayanti dan Kurniawan (2022), penerapan mekanisme pengawasan internal yang kuat dan transparansi dalam pelaporan keuangan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan secara signifikan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari pemangku kepentingan, corporate governance menjadi faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan perusahaan publik. Penelitian sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Fadilah et al. (2023), menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik CG yang baik mampu menahan dampak negatif tekanan pasar, meminimalkan risiko fraud, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, penelitian oleh Lestari dan Pramono (2022) menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip CG dalam pengambilan keputusan strategis berkontribusi positif terhadap profitabilitas, likuiditas, dan nilai pasar perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik corporate governance di Indonesia dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan publik. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi perusahaan dalam memperbaiki tata kelola dan sebagai referensi bagi regulator dalam menetapkan kebijakan yang mendorong penerapan CG yang lebih efektif. Dengan demikian, implementasi praktik corporate governance yang optimal tidak hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga strategi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan di pasar modal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh praktik corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan memperkuat bukti empiris tentang hubungan CG dan kinerja keuangan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi manajemen perusahaan dan regulator dalam meningkatkan kualitas tata kelola. Dengan penerapan prinsip CG yang efektif, perusahaan di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan performa keuangan, mempertahankan kepercayaan investor, dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengaruh praktik corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan prinsip-prinsip corporate governance dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, bukan sekadar mengukur angka atau rasio keuangan. Menurut Sutrisno et al. (2021), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena organisasi secara holistik, termasuk praktik tata kelola perusahaan, mekanisme pengawasan, dan transparansi laporan keuangan yang tercermin dalam dokumen resmi perusahaan.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4571
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur. Data utama diambil dari laporan tahunan perusahaan, dokumen publik terkait corporate governance dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta publikasi ilmiah dan jurnal yang membahas hubungan CG dengan kinerja keuangan perusahaan selama lima tahun terakhir (2019–2024). Nugroho et al. (2021) menyatakan bahwa analisis dokumen sekunder merupakan metode yang valid untuk menilai praktik CG dan kinerja perusahaan, karena dokumen resmi perusahaan mencerminkan kebijakan, struktur pengawasan, dan hasil kinerja yang sebenarnya. Studi literatur tambahan juga digunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik, fenomena kelemahan tata kelola, serta dampaknya terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan (Wijayanti & Kurniawan, 2022).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis konten dan deskriptif kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Data diklasifikasikan berdasarkan praktik corporate governance, seperti transparansi, akuntabilitas, independensi dewan komisaris, dan perlindungan pemegang saham minoritas, kemudian dikaitkan dengan indikator kinerja keuangan, misalnya Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Menurut Prasetyo dan Hadi (2022), metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggambarkan hubungan kausal secara naratif, sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pengaruh praktik CG terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia, sekaligus menjadi dasar rekomendasi praktis bagi manajemen dan regulator.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis praktik corporate governance (CG) dan kinerja keuangan pada 10 perusahaan terpilih yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2024. Praktik CG dinilai berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu: transparansi laporan keuangan, independensi dewan komisaris, akuntabilitas manajemen, dan perlindungan pemegang saham minoritas. Sedangkan kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) yang tercantum dalm laporan tahunan perusahaan.

Tabel 1. Ringkasan Praktik Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan (2024)

Perusahaan	Transparansi Laporan	Independen Dewan Komisaris	Akuntabilitas Manajemen	Perlindungan Pemegang Saham Minoritas	ROA (%)	ROE (%)
A	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	12,5	18,2
B	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	9,8	14,1
C	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	5,2	8,7
D	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	13,1	19,5
E	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8,7	12,9
F	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	4,9	7,8
G	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	11,9	17,6
H	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	7,5	11,2
I	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	5,8	9,1
J	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	12,7	18,8

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pola bahwa perusahaan dengan praktik corporate governance tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan lebih baik, baik dilihat dari ROA maupun ROE. Sebaliknya, perusahaan dengan praktik CG rendah menunjukkan performa keuangan yang lebih lemah.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4571
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)



Gambar 1. Perbandingan Praktik Corporate Governance dan ROE Perusahaan Terpilih (2024)

Dari grafik ini terlihat bahwa perusahaan A, D, G, dan J yang memiliki CG tinggi menunjukkan ROE di atas 17%, sedangkan perusahaan C, F, dan I yang CG-nya rendah hanya mencapai ROE 7–9%. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara penerapan praktik corporate governance yang baik dan kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung temuan para ahli terbaru. Menurut Nugroho et al. (2021), perusahaan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang kuat cenderung lebih mampu mempertahankan profitabilitas dan nilai perusahaan. Selain itu, Wijayanti & Kurniawan (2022) menekankan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan independensi dewan komisaris secara signifikan meningkatkan kepercayaan investor, yang berdampak positif pada kinerja keuangan. Temuan ini konsisten dengan hipotesis penelitian bahwa praktik corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara praktik corporate governance (CG) dan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang menerapkan praktik CG tinggi—dengan transparansi laporan keuangan yang baik, akuntabilitas manajemen yang jelas, independensi dewan komisaris, dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas—cenderung memiliki Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan praktik CG yang rendah. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2021) yang menyatakan bahwa implementasi prinsip CG yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko fraud, dan mendorong stabilitas kinerja keuangan.

Analisis tabel dan grafik menunjukkan pola yang jelas bahwa perusahaan dengan CG rendah cenderung memiliki kinerja keuangan yang kurang optimal. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi laporan keuangan, dan minimnya perlindungan bagi pemegang saham minoritas, sehingga menimbulkan risiko konflik kepentingan dan penurunan kepercayaan investor. Menurut Prasetyo dan Hadi (2022), praktik CG yang tidak konsisten menjadi salah satu faktor utama penyebab volatilitas kinerja keuangan perusahaan di Indonesia, terutama pada perusahaan publik yang menghadapi tekanan pasar dan persaingan global.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa setiap indikator CG memiliki kontribusi yang berbeda terhadap kinerja keuangan. Misalnya, transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan independensi dewan komisaris dan perlindungan pemegang saham minoritas lebih berpengaruh pada ROE dan persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijayanti & Kurniawan (2022), yang menekankan bahwa perlindungan pemegang saham minoritas dan dewan komisaris yang independen meningkatkan kepercayaan investor, sehingga berdampak positif terhadap profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, penerapan praktik corporate governance yang baik tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan kinerja keuangan dan daya saing perusahaan di pasar modal.

Interpretasi Umum Hubungan Tata Kelola dan Kinerja Keuangan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4571
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pola yang ditampilkan pada Tabel 1 memperkuat penjelasan bahwa kualitas tata kelola perusahaan berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengelola sumber daya dan modal pemegang saham. Empat perusahaan yang dikategorikan memiliki praktik corporate governance tinggi, yaitu perusahaan A, D, G, dan J, secara konsisten memperlihatkan ROA dan ROE yang lebih tinggi daripada kelompok perusahaan dengan praktik tata kelola sedang maupun rendah. Pola tersebut tidak hanya tampak pada satu indikator keuangan, tetapi muncul secara bersamaan pada dua ukuran profitabilitas yang digunakan. ROA menggambarkan efektivitas pemanfaatan keseluruhan aset dalam menghasilkan laba, sedangkan ROE menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan pengembalian atas modal pemegang saham. Ketika kedua ukuran tersebut bergerak lebih tinggi pada perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik, dapat dipahami bahwa mekanisme pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak pemegang saham bekerja secara saling melengkapi dalam mendukung keputusan bisnis yang lebih terarah.

Jika data pada Tabel 1 dikelompokkan secara deskriptif, perusahaan dengan penerapan corporate governance tinggi memiliki rata-rata ROA sekitar 12,55% dan rata-rata ROE sekitar 18,53%. Kelompok dengan penerapan sedang memiliki rata-rata ROA sekitar 8,67% dan ROE sekitar 12,73%, sedangkan kelompok dengan penerapan rendah menunjukkan rata-rata ROA sekitar 5,30% dan ROE sekitar 8,53%. Perbedaan antarkelompok tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengujian statistik baru, melainkan sebagai penegasan atas pola yang telah ditampilkan dalam tabel dan grafik penelitian. Secara deskriptif, semakin baik penerapan prinsip tata kelola, semakin baik pula capaian profitabilitas perusahaan. Pola bertingkat ini memberi dasar yang kuat bagi interpretasi bahwa corporate governance bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi berhubungan dengan disiplin organisasi dalam menggunakan aset, mengendalikan biaya, mengelola risiko, dan menjaga modal yang dipercayakan oleh investor.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui fungsi corporate governance sebagai mekanisme pengendalian perilaku manajemen. Dalam perusahaan publik, pemegang saham tidak selalu terlibat langsung dalam aktivitas operasional sehingga terdapat jarak informasi antara pemilik modal dan pihak manajemen. Transparansi laporan, akuntabilitas keputusan, serta pengawasan oleh dewan komisaris membantu memperkecil jarak tersebut. Manajemen menjadi lebih terdorong untuk menyampaikan informasi secara terbuka, menggunakan aset sesuai kepentingan perusahaan, dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Kondisi ini dapat mengurangi peluang penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan memudahkan perusahaan menjaga fokus pada penciptaan nilai. Temuan penelitian sejalan dengan Sutrisno et al. (2021) dan Nugroho et al. (2021), yang menempatkan tata kelola sebagai unsur penting dalam memperkuat kepercayaan investor dan stabilitas perusahaan.

Meskipun demikian, hasil penelitian perlu dipahami dalam batas pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan. Data menunjukkan keterkaitan yang konsisten antara kualitas tata kelola dan kinerja keuangan, tetapi tidak menyatakan bahwa seluruh perubahan ROA dan ROE hanya disebabkan oleh corporate governance. Kinerja perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik industri, ukuran perusahaan, kondisi pasar, struktur modal, kemampuan manajemen, dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, corporate governance lebih tepat dipahami sebagai kerangka yang menciptakan kondisi agar keputusan keuangan dan operasional dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Kerangka tersebut meningkatkan kemungkinan perusahaan menghasilkan kinerja yang lebih baik, terutama ketika dipadukan dengan strategi bisnis, kompetensi manajerial, dan pengelolaan risiko yang memadai.

Transparansi Laporan Keuangan dan Efektivitas Penggunaan Aset

Transparansi laporan keuangan merupakan salah satu indikator corporate governance yang paling dekat hubungannya dengan penilaian kinerja perusahaan. Transparansi tidak hanya berarti laporan tersedia bagi publik, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan waktu, kelengkapan informasi, konsistensi penyajian, serta kemampuan laporan menjelaskan kondisi perusahaan secara wajar. Informasi yang transparan membantu pemegang saham, kreditur, regulator, dan pihak internal menilai bagaimana aset digunakan dan seberapa besar hasil yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, perusahaan dengan transparansi tinggi cenderung memiliki ROA yang lebih besar. Perusahaan A, D, G, dan J yang dikategorikan memiliki transparansi tinggi menunjukkan ROA antara 11,9% sampai 13,1%, sedangkan perusahaan dengan transparansi rendah berada pada kisaran 4,9% sampai 5,8%. Pola tersebut mendukung uraian bahwa keterbukaan informasi berjalan beriringan dengan efektivitas pengelolaan aset.

Transparansi dapat mendorong efektivitas penggunaan aset melalui beberapa mekanisme. Pertama, pelaporan yang terbuka memudahkan pemantauan atas keputusan investasi, penggunaan kas, pengadaan aset, dan aktivitas operasional. Ketika manajemen mengetahui bahwa keputusan tersebut dapat ditelusuri dan dinilai oleh dewan komisaris maupun pemegang saham, kecenderungan untuk melakukan pengeluaran yang tidak mendukung tujuan perusahaan dapat ditekan. Kedua, laporan yang akurat membantu manajemen mengidentifikasi aset yang produktif

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4571
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dan aset yang kurang memberikan kontribusi. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki alokasi sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Ketiga, transparansi memperkuat proses audit dan pengendalian internal karena ketidaksesuaian dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Keterkaitan transparansi dengan ROA juga dapat dipahami dari sisi kepercayaan pihak eksternal. Perusahaan yang terbuka mengenai kondisi keuangan, risiko, dan kebijakan strategis lebih mudah memperoleh kepercayaan dari investor serta kreditur. Kepercayaan tersebut dapat memperluas akses terhadap sumber pendanaan dan mengurangi ketidakpastian dalam hubungan bisnis. Walaupun akses pendanaan tidak secara otomatis meningkatkan laba, perusahaan yang memiliki kredibilitas lebih baik mempunyai ruang yang lebih besar untuk mendukung kegiatan produktif. Fadilah et al. (2023) menekankan hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kinerja perusahaan, sedangkan Hartono dan Setiawan (2020) mengaitkan kualitas tata kelola serta audit dengan nilai perusahaan. Temuan tersebut relevan dengan pola penelitian ini yang memperlihatkan capaian keuangan lebih baik pada perusahaan dengan keterbukaan yang tinggi.

Transparansi yang berkualitas juga mencegah informasi hanya menjadi formalitas. Laporan yang banyak tetapi tidak menjelaskan risiko utama, transaksi penting, atau alasan perubahan kinerja belum tentu membantu pengguna mengambil keputusan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memastikan bahwa informasi disajikan secara material, mudah dipahami, dan konsisten antartahun. Dalam praktiknya, transparansi dapat diperkuat melalui penyajian kebijakan akuntansi yang jelas, penjelasan atas perubahan kinerja, pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi, pelaporan risiko, dan tindak lanjut atas temuan audit. Langkah tersebut menjaga agar laporan tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga benar-benar menjadi sarana pertanggungjawaban. Dengan demikian, transparansi berperan sebagai fondasi untuk meningkatkan disiplin pemanfaatan aset, memperbaiki kualitas keputusan, dan pada akhirnya mendukung ROA yang lebih baik.

Akuntabilitas Manajemen dan Penciptaan Kinerja Operasional

Akuntabilitas manajemen menunjukkan adanya kejelasan mengenai siapa yang mengambil keputusan, dasar keputusan yang digunakan, target yang hendak dicapai, dan pihak yang bertanggung jawab atas hasilnya. Dalam penelitian ini, perusahaan dengan tingkat akuntabilitas tinggi berada pada kelompok yang memiliki ROA dan ROE tertinggi. Sebaliknya, perusahaan yang akuntabilitasnya rendah cenderung menunjukkan capaian keuangan yang lebih rendah. Kondisi tersebut dapat dijelaskan karena akuntabilitas menciptakan hubungan yang jelas antara kewenangan dan tanggung jawab. Manajer tidak hanya diberi ruang untuk mengelola perusahaan, tetapi juga wajib menjelaskan penggunaan sumber daya, pencapaian target, serta penyimpangan yang terjadi. Kejelasan tersebut meningkatkan kedisiplinan proses perencanaan dan pengendalian kinerja.

Akuntabilitas berperan penting dalam memastikan strategi perusahaan diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur. Tujuan organisasi perlu diturunkan ke dalam sasaran unit, indikator kinerja, anggaran, dan jadwal evaluasi. Tanpa mekanisme tersebut, keputusan dapat bersifat reaktif dan sulit dinilai keberhasilannya. Ketika akuntabilitas berjalan baik, manajemen dapat membandingkan hasil aktual dengan target, mengidentifikasi penyebab perbedaan, dan melakukan perbaikan secara tepat waktu. Proses ini membantu perusahaan mengendalikan biaya, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi kegiatan yang tidak menghasilkan nilai tambah. Dampaknya tercermin pada kemampuan aset dan modal menghasilkan laba. Dengan kata lain, akuntabilitas menghubungkan prinsip tata kelola dengan aktivitas operasional sehari-hari.

Akuntabilitas juga memperkuat koordinasi antara direksi, dewan komisaris, komite audit, dan unit pengendalian internal. Setiap pihak memiliki fungsi yang berbeda, tetapi seluruhnya membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menjalankan tugas. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, dewan komisaris melakukan pengawasan, sementara komite audit dan audit internal membantu memastikan kepatuhan serta efektivitas pengendalian. Apabila pembagian peran tidak jelas, pengawasan dapat tumpang tindih atau justru menimbulkan ruang yang tidak diawasi. Perusahaan dengan tata kelola tinggi cenderung memiliki batas kewenangan dan saluran pelaporan yang lebih jelas sehingga masalah dapat direspons lebih cepat. Hal ini mendukung pandangan Pratama dan Hidayat (2023) bahwa tata kelola dan manajemen risiko perlu berjalan bersama untuk menjaga kinerja perusahaan.

Dalam kaitannya dengan kinerja keuangan, akuntabilitas tidak hanya dinilai dari keberadaan laporan pertanggungjawaban, tetapi dari tindak lanjut yang dilakukan. Evaluasi tanpa perbaikan tidak akan menghasilkan perubahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menghubungkan hasil evaluasi dengan kebijakan penghargaan, pengembangan kompetensi, perbaikan prosedur, dan pengendalian risiko. Manajemen yang berhasil mencapai

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4571
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

target secara etis dan berkelanjutan perlu memperoleh pengakuan, sedangkan penyimpangan harus ditangani melalui mekanisme yang objektif. Pendekatan tersebut mengurangi kemungkinan keputusan jangka pendek yang hanya memperindah hasil keuangan sementara. Akuntabilitas yang konsisten mendorong perusahaan membangun kinerja yang lebih stabil, dapat ditelusuri, dan mampu dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Independensi Dewan Komisaris dan Penguatan Return on Equity

Independensi dewan komisaris merupakan mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham. Dewan komisaris yang independen diharapkan mampu menilai kebijakan direksi secara objektif, memberikan nasihat, serta melakukan pengawasan tanpa dipengaruhi hubungan kepentingan tertentu. Dalam tabel penelitian, perusahaan dengan independensi dewan komisaris tinggi umumnya menunjukkan ROE yang lebih besar. Perusahaan A, D, G, dan J memiliki tingkat independensi tinggi dan ROE di atas 17%, sementara perusahaan F dan I yang independensinya rendah memiliki ROE masing-masing 7,8% dan 9,1%. Perusahaan B juga menunjukkan bahwa independensi yang tinggi dapat tetap memberikan dukungan pada ROE, meskipun indikator tata kelola lainnya masih berada pada tingkat sedang. Pola ini memperkuat pembahasan bahwa independensi pengawasan berkaitan dengan perlindungan modal pemegang saham.

ROE menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas yang ditanamkan pemegang saham. Keputusan yang memengaruhi ROE meliputi penggunaan utang, pembagian laba, investasi, ekspansi, efisiensi operasi, serta kebijakan risiko. Dewan komisaris yang independen dapat membantu memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu atau mengejar hasil jangka pendek. Melalui pengawasan yang objektif, dewan dapat meminta penjelasan atas investasi bernilai besar, menilai kelayakan kebijakan pendanaan, dan memastikan risiko telah dipertimbangkan. Pengawasan demikian mengurangi kemungkinan modal digunakan untuk proyek yang tidak sejalan dengan strategi atau memiliki konflik kepentingan.

Independensi juga penting dalam proses evaluasi kinerja manajemen. Penilaian terhadap direksi harus didasarkan pada sasaran yang terukur dan keberlanjutan hasil, bukan kedekatan personal. Dewan komisaris yang memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dapat menantang asumsi manajemen, meminta alternatif keputusan, dan mendorong pengungkapan informasi yang lebih lengkap. Fungsi ini bukan untuk menghambat direksi, melainkan memastikan keputusan strategis telah melalui pertimbangan yang memadai. Astuti dan Haryanto (2020) serta Lestari dan Pramono (2022) menempatkan struktur dan independensi dewan sebagai bagian penting dari tata kelola yang berkaitan dengan kinerja keuangan. Temuan penelitian ini konsisten dengan pandangan tersebut, terutama pada pola ROE perusahaan dengan tingkat independensi tinggi.

Namun, independensi tidak cukup hanya ditunjukkan oleh jumlah komisaris independen. Efektivitasnya juga dipengaruhi oleh kompetensi, pengalaman, akses terhadap informasi, intensitas rapat, dan keberanian menyampaikan pandangan yang berbeda. Komisaris yang secara formal independen tetapi tidak memahami bisnis atau tidak memperoleh informasi yang memadai akan sulit menjalankan pengawasan secara efektif. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan proses nominasi yang transparan, program orientasi, pengembangan kompetensi, serta akses langsung terhadap komite audit dan audit internal. Dengan dukungan tersebut, independensi menjadi fungsi nyata yang membantu menjaga keputusan pendanaan dan investasi tetap selaras dengan kepentingan perusahaan serta pemegang saham.

Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dan Kepercayaan Investor

Perlindungan pemegang saham minoritas merupakan indikator corporate governance yang menunjukkan tingkat kewajaran dalam perlakuan terhadap seluruh pemilik modal. Pemegang saham minoritas memiliki hak ekonomi dan hak informasi, tetapi sering kali tidak memiliki kekuatan suara sebesar pemegang saham pengendali. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola dibutuhkan untuk mencegah keputusan yang hanya menguntungkan kelompok pengendali. Dalam penelitian ini, perusahaan dengan perlindungan pemegang saham minoritas tinggi berada pada kelompok ROE tertinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan perlindungan rendah menunjukkan ROE yang lebih kecil. Pola tersebut menggambarkan bahwa kewajaran perlakuan terhadap investor berkaitan dengan kepercayaan pasar dan kualitas pengelolaan ekuitas.

Perlindungan dapat diwujudkan melalui keterbukaan agenda rapat umum pemegang saham, kemudahan memperoleh informasi, mekanisme pemungutan suara yang jelas, pengungkapan transaksi benturan kepentingan, serta kesempatan menyampaikan pendapat. Mekanisme tersebut membuat keputusan perusahaan lebih dapat diawasi dan mengurangi risiko pengalihan manfaat kepada pihak tertentu. Ketika investor percaya bahwa haknya

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4571
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dihormati, mereka cenderung menilai perusahaan memiliki risiko tata kelola yang lebih rendah. Kepercayaan tersebut penting karena perusahaan publik bergantung pada kemampuan mempertahankan dukungan pemegang saham dan memperoleh modal ketika membutuhkan ekspansi. Rahman dan Lestari (2021) serta Wijayanti dan Kurniawan (2022) menekankan bahwa tata kelola yang melindungi investor dapat memperkuat kepercayaan dan kinerja perusahaan.

Perlindungan pemegang saham minoritas juga mendorong manajemen memperhatikan kualitas keputusan jangka panjang. Keputusan mengenai transaksi afiliasi, restrukturisasi, pembagian dividen, atau penerbitan saham baru dapat berdampak berbeda bagi kelompok pemegang saham. Prosedur yang transparan dan penilaian independen membantu memastikan keputusan dilakukan secara wajar. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham terbesar, tetapi pada penciptaan nilai perusahaan secara keseluruhan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan reputasi dan menurunkan persepsi risiko, yang pada akhirnya mendukung stabilitas harga saham serta akses terhadap pendanaan.

Dalam implementasinya, perusahaan perlu menyediakan saluran komunikasi yang dapat digunakan investor untuk memperoleh klarifikasi dan menyampaikan keluhan. Informasi penting harus disampaikan secara serentak agar tidak menimbulkan ketimpangan akses. Komite audit, sekretaris perusahaan, dan dewan komisaris memiliki peran dalam memastikan pengungkapan serta penanganan benturan kepentingan dilakukan sesuai ketentuan. Perlindungan yang efektif bukan hanya bermanfaat bagi pemegang saham minoritas, tetapi juga bagi perusahaan karena meningkatkan legitimasi pengambilan keputusan. Ketika seluruh pemegang saham merasa diperlakukan adil, konflik dapat dikurangi dan perhatian manajemen dapat difokuskan pada peningkatan kinerja operasional serta pertumbuhan berkelanjutan.

Perbandingan Kelompok Perusahaan dan Konsistensi Pola Kinerja

Perbandingan antarkelompok perusahaan memberikan pemahaman lebih rinci mengenai hubungan antara corporate governance dan kinerja keuangan. Kelompok tata kelola tinggi terdiri atas perusahaan A, D, G, dan J. Keempatnya memperoleh penilaian tinggi pada seluruh indikator, yaitu transparansi, independensi dewan komisaris, akuntabilitas manajemen, dan perlindungan pemegang saham minoritas. Konsistensi pada seluruh indikator tersebut diikuti oleh ROA dan ROE yang relatif berdekatan serta berada pada tingkat tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang baik tidak bergantung pada satu indikator saja. Keunggulan muncul ketika prinsip tata kelola diterapkan secara menyeluruh dan saling mendukung.

Kelompok tata kelola sedang terdiri atas perusahaan B, E, dan H. Pada kelompok ini, ROA dan ROE berada di antara kelompok tinggi dan rendah. Perusahaan B memiliki independensi dewan komisaris tinggi, tetapi transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pemegang saham minoritas masih berada pada tingkat sedang. ROA dan ROE perusahaan B lebih tinggi daripada perusahaan E dan H, tetapi tetap di bawah perusahaan dengan tata kelola tinggi secara menyeluruh. Pola ini memberi gambaran bahwa penguatan satu indikator dapat memberikan manfaat, namun hasil yang lebih optimal memerlukan dukungan indikator lain. Independensi pengawasan akan lebih efektif apabila informasi transparan, pertanggungjawaban manajemen jelas, dan hak pemegang saham dilindungi.

Kelompok tata kelola rendah terdiri atas perusahaan C, F, dan I. Perusahaan F memiliki penilaian rendah pada seluruh indikator dan menunjukkan ROA serta ROE terendah. Perusahaan C memiliki independensi dewan komisaris sedang, tetapi indikator lainnya rendah, sedangkan perusahaan I memiliki akuntabilitas sedang dengan indikator lain rendah. Keduanya menunjukkan sedikit perbedaan kinerja dibanding perusahaan F, tetapi masih jauh di bawah kelompok sedang dan tinggi. Pola tersebut kembali menunjukkan bahwa perbaikan sebagian indikator belum cukup untuk menyamai kinerja perusahaan yang menerapkan corporate governance secara terpadu. Tata kelola merupakan sistem; kelemahan pada transparansi dapat mengurangi kualitas pengawasan, sedangkan perlindungan pemegang saham yang lemah dapat menurunkan kepercayaan meskipun akuntabilitas internal mulai diperbaiki.

Perbandingan ini juga menegaskan pentingnya konsistensi. Tata kelola yang baik tidak dapat dibangun melalui kebijakan sesaat atau hanya ketika perusahaan menghadapi tekanan. Transparansi, pengawasan, akuntabilitas, dan kewajaran perlu menjadi kebiasaan organisasi yang tercermin dalam prosedur, perilaku pimpinan, sistem informasi, dan evaluasi kinerja. Perusahaan yang konsisten lebih mudah mendeteksi masalah, melakukan koreksi, dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Sebaliknya, penerapan yang tidak merata dapat menghasilkan titik lemah yang mengurangi manfaat indikator lainnya. Oleh sebab itu, program peningkatan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4571
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

corporate governance sebaiknya dirancang berdasarkan evaluasi menyeluruh, bukan hanya memenuhi satu ukuran formal.

Implikasi Manajerial bagi Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa manajemen perusahaan perlu menempatkan corporate governance sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja, bukan sekadar kewajiban kepatuhan. Transparansi dapat diintegrasikan dengan sistem pelaporan manajemen agar informasi keuangan dan operasional tersedia tepat waktu. Akuntabilitas dapat diperkuat melalui sasaran kinerja yang jelas, pembagian tanggung jawab, dan evaluasi berkala. Independensi dewan komisaris perlu didukung oleh akses informasi serta kompetensi yang relevan. Sementara itu, perlindungan pemegang saham minoritas harus tercermin dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan benturan kepentingan. Integrasi tersebut membantu perusahaan membangun mekanisme pengendalian yang bekerja dari tingkat strategis hingga operasional.

Bagi direksi, temuan penelitian menekankan pentingnya menunjukkan kepemimpinan yang terbuka terhadap pengawasan. Direksi perlu menyampaikan dasar keputusan, risiko, dan hasil pelaksanaan secara jelas kepada dewan komisaris serta pemegang saham. Pengawasan tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai proses untuk meningkatkan kualitas keputusan. Manajemen juga perlu memastikan laporan keuangan didukung oleh data yang andal dan sistem pengendalian internal yang memadai. Ketika informasi akurat tersedia lebih cepat, tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum masalah memengaruhi kinerja secara luas.

Bagi dewan komisaris, fokus pengawasan perlu diarahkan pada area yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, seperti strategi, risiko, transaksi material, kualitas pelaporan, dan tindak lanjut audit. Dewan tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Pengawasan yang terlalu berorientasi pada capaian jangka pendek dapat mendorong manajemen mengambil risiko berlebihan atau menunda pengeluaran penting. Sebaliknya, pengawasan yang mempertimbangkan keberlanjutan membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara profitabilitas, kehati-hatian, dan pertumbuhan. Komite audit dapat mendukung fungsi tersebut dengan menilai kualitas laporan dan efektivitas pengendalian internal.

Perusahaan juga perlu membangun budaya tata kelola pada seluruh tingkat organisasi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak cukup diterapkan oleh direksi saja. Karyawan yang mengelola data, transaksi, pengadaan, penjualan, dan layanan pelanggan turut menentukan kualitas informasi serta pengendalian. Pelatihan etika, mekanisme pelaporan pelanggaran, pemisahan tugas, dan evaluasi kepatuhan menjadi bagian penting dari implementasi. Budaya yang mendukung keterbukaan akan memudahkan organisasi mengidentifikasi masalah tanpa menunggu kerugian terjadi. Dengan demikian, peningkatan corporate governance menjadi investasi dalam kualitas proses bisnis yang dapat memperkuat kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Implikasi bagi Regulator dan Pengembangan Tata Kelola Berkelanjutan

Bagi regulator, hasil penelitian mendukung pentingnya kebijakan yang mendorong kualitas penerapan, bukan hanya kelengkapan dokumen. Perusahaan dapat memiliki pedoman tata kelola, komite, dan laporan yang lengkap, tetapi efektivitasnya perlu dilihat dari konsistensi pelaksanaan. Pengawasan dapat diarahkan pada kualitas pengungkapan, independensi pengambilan keputusan, tindak lanjut temuan audit, dan perlindungan investor. Pendekatan berbasis risiko akan membantu regulator memusatkan perhatian pada perusahaan atau area yang memiliki potensi dampak lebih besar terhadap investor dan stabilitas pasar.

Regulator juga dapat memperkuat pedoman pelaporan agar informasi corporate governance lebih mudah dibandingkan antarkorporasi. Pengungkapan yang seragam mengenai struktur dewan, kehadiran rapat, kompetensi, transaksi benturan kepentingan, dan tindak lanjut pengawasan dapat meningkatkan kualitas penilaian investor. Namun, standardisasi tetap perlu memberi ruang bagi perbedaan karakteristik industri dan ukuran perusahaan. Tujuannya bukan menyeragamkan seluruh proses bisnis, melainkan memastikan informasi minimum tersedia dan dapat digunakan untuk menilai efektivitas tata kelola. Otoritas juga dapat mendorong pendidikan bagi direksi, komisaris, komite audit, dan sekretaris perusahaan agar perubahan regulasi diterapkan secara tepat.

Pengembangan tata kelola ke depan perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan keberlanjutan. Perusahaan menghadapi tuntutan untuk memperhatikan risiko lingkungan, sosial, teknologi, dan perubahan pasar. Prinsip corporate governance membantu memastikan risiko tersebut masuk dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengungkapan. Dewan komisaris perlu memahami risiko jangka panjang, sedangkan manajemen harus menghubungkan strategi keberlanjutan dengan alokasi sumber daya serta indikator kinerja. Dengan pendekatan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4571
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tersebut, tata kelola tidak hanya bertujuan mempertahankan profitabilitas saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan perusahaan menghasilkan nilai pada masa mendatang.

Kolaborasi antara perusahaan, regulator, investor, auditor, dan lembaga profesi diperlukan untuk memperkuat ekosistem tata kelola. Investor dapat menggunakan hak suara dan dialog untuk mendorong perbaikan, auditor menjaga kualitas informasi, sementara lembaga profesi mendukung standar kompetensi. Perusahaan pada akhirnya tetap menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas penerapan. Kebijakan eksternal akan efektif apabila didukung komitmen internal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan penerapan yang lebih menyeluruh memiliki kinerja lebih baik secara deskriptif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perlu diarahkan pada perubahan proses dan perilaku organisasi yang konsisten, bukan hanya penyesuaian dokumen menjelang pelaporan.

Keterbatasan Analisis dan Arah Penguatan Penelitian

Pembahasan yang diperluas tetap mengikuti ruang lingkup penelitian, yaitu analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dan perbandingan deskriptif terhadap 10 perusahaan terpilih. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai pola hubungan corporate governance dengan ROA dan ROE, tetapi belum menguji besarnya pengaruh secara statistik. Kategori tinggi, sedang, dan rendah juga merupakan penyederhanaan untuk memudahkan interpretasi. Pada praktiknya, kualitas tata kelola memiliki banyak dimensi yang dapat berbeda antarindustri. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih tepat digunakan sebagai penjelasan awal dan bahan evaluasi, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan kausal yang berlaku sama bagi seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Keterbatasan lain berasal dari penggunaan data satu periode. Kinerja keuangan dapat berfluktuasi karena perubahan ekonomi dan kondisi khusus perusahaan. Penelitian lanjutan dapat menggunakan data beberapa tahun untuk menilai konsistensi penerapan tata kelola dan perubahan kinerja. Analisis longitudinal akan membantu membedakan antara perbaikan sementara dan peningkatan yang berkelanjutan. Penelitian juga dapat memperluas indikator kinerja, misalnya margin laba, nilai perusahaan, risiko, atau stabilitas arus kas, agar dampak corporate governance terlihat dari berbagai sudut.

Pengukuran corporate governance dapat diperinci melalui indikator kuantitatif, seperti proporsi komisaris independen, jumlah rapat, tingkat kehadiran, ukuran komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan kelengkapan pengungkapan. Data tersebut dapat dianalisis menggunakan regresi atau data panel untuk menguji pengaruh masing-masing indikator. Namun, pendekatan kuantitatif tetap perlu dilengkapi dengan pemahaman kualitatif karena keberadaan struktur formal belum selalu mencerminkan efektivitas. Wawancara dengan manajemen, komisaris, auditor, dan investor dapat menjelaskan bagaimana proses pengawasan dan pengambilan keputusan benar-benar berlangsung.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, hasil penelitian memberikan pesan yang konsisten. Perusahaan dengan transparansi, akuntabilitas, independensi, dan perlindungan pemegang saham yang lebih baik menunjukkan ROA dan ROE lebih tinggi pada data yang dianalisis. Pesan ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengevaluasi kelemahan tata kelola secara menyeluruh. Perbaikan perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari area berisiko tinggi, disertai target, penanggung jawab, dan evaluasi. Dengan cara tersebut, corporate governance dapat berkembang dari sekadar persyaratan formal menjadi sistem yang mendukung kualitas keputusan, kepercayaan investor, efisiensi operasional, dan keberlanjutan kinerja keuangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik corporate governance memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip corporate governance dengan baik, termasuk transparansi laporan keuangan, independensi dewan komisaris, akuntabilitas manajemen, serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, cenderung menunjukkan performa keuangan yang lebih tinggi, baik dari sisi Return on Assets (ROA) maupun Return on Equity (ROE). Temuan ini sejalan dengan pendapat Nugroho et al. (2021), yang menyatakan bahwa praktik corporate governance yang efektif mampu meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko kecurangan, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Setiap indikator corporate governance memberikan kontribusi yang berbeda terhadap kinerja keuangan perusahaan. Transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas manajemen secara signifikan memengaruhi profitabilitas perusahaan, sedangkan independensi dewan komisaris dan perlindungan pemegang saham minoritas lebih berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan persepsi investor terhadap kinerja perusahaan. Hal ini

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4571
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mengindikasikan bahwa penerapan praktik corporate governance yang menyeluruh dan konsisten tidak hanya memenuhi regulasi OJK, tetapi juga menjadi strategi penting bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan stabilitas kinerja keuangan di pasar modal Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Wijayanti & Kurniawan (2022).

Referensi

1. Astuti, R., & Haryanto, S. (2020). *Independensi dewan direksi, struktur kepemilikan, dan kinerja keuangan: Bukti dari Indonesia.* Cogent Business & Management, 7(1), 180–197.
2. Fadilah, M., Ramadhani, R., & Puspitasari, N. (2023). *Transparansi, akuntabilitas, dan kinerja perusahaan: Bukti dari perusahaan manufaktur di Indonesia.* Management Science Letters, 13(5), 367–378.
3. Fauzan, M., & Sari, N. (2021). *Tata kelola perusahaan dan profitabilitas: Bukti empiris dari perusahaan publik di Indonesia.* Jurnal Riset Akuntansi, Bisnis, dan Keuangan, 12(3), 55–66.
4. Hartono, R., & Setiawan, A. (2020). *Tata kelola perusahaan, kualitas audit, dan nilai perusahaan: Bukti dari Bursa Efek Indonesia.* Asian Journal of Accounting Research, 5(3), 211–229.
5. Indrawati, S., & Prakoso, H. (2023). *Tata kelola perusahaan, kualitas pelaporan keuangan, dan kinerja perusahaan: Bukti dari Indonesia.* Jurnal Keuangan dan Akuntansi, 7(2), 77–91.
6. Lestari, D., & Pramono, S. (2022). *Struktur dewan direksi, tata kelola perusahaan, dan kinerja keuangan: Bukti dari Indonesia.* Jurnal Studi Tata Kelola Perusahaan, 8(2), 85–102.
7. Nugroho, A., Santoso, B., & Prasetya, D. (2021). *Dampak tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan: Bukti dari Indonesia.* Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 45–58.
8. Prasetyo, H., & Hadi, S. (2022). *Peran independensi dan transparansi dewan direksi terhadap profitabilitas perusahaan: Bukti dari perusahaan publik di Indonesia.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 37(3), 210–225.
9. Pratama, D., & Hidayat, R. (2023). *Tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kinerja perusahaan: Sebuah studi di Indonesia.* Jurnal Internasional Ekonomi dan Isu-isu Keuangan, 13(2), 101–113.
10. Putri, T., & Nugraha, A. (2020). *Praktik tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan publik di Indonesia.* Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 15(4), 88–102.
11. Rahmawati, L., & Putra, I. (2022). *Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan: Studi empiris perusahaan tercatat di Indonesia.* Jurnal Bisnis dan Manajemen, 21(7), 34–49.
12. Rahman, A., & Lestari, F. (2021). *Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan dan kepercayaan investor di Indonesia.* Jurnal Riset Bisnis Asia, 11(2), 45–60.
13. Sutrisno, E., Fauzi, A., & Wibowo, R. (2021). *Praktik tata kelola perusahaan dan kepercayaan investor di pasar saham Indonesia.* Jurnal Internasional Keuangan & Ekonomi, 26(4), 4981–4995.
14. Santoso, E., & Wulandari, P. (2022). *Transparansi dan akuntabilitas sebagai determinan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia.* Jurnal Tata Kelola Perusahaan Indonesia, 6(1), 22–38.
15. Wijayanti, R., & Kurniawan, T. (2022). *Tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan: Sebuah studi pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.* Asian Journal of Business and Accounting, 15(1), 123–144.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4571
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)